

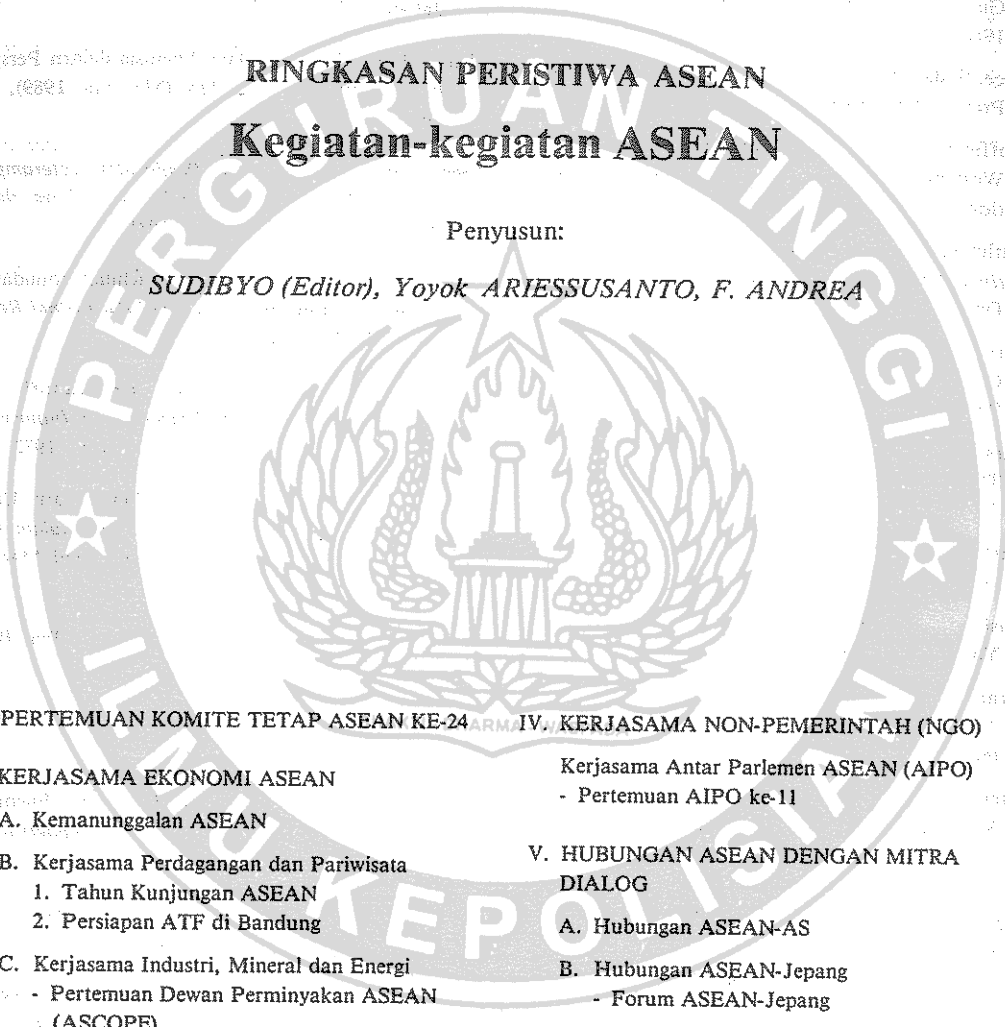
201

Dokumen

RINGKASAN PERISTIWA ASEAN
Kegiatan-kegiatan ASEAN

Penyusun:

SUDIBYO (Editor), Yoyok ARIESSUSANTO, F. ANDREA

- 
- I. PERTEMUAN KOMITE TETAP ASEAN KE-24** **IV. KERJASAMA NON-PEMERINTAH (NGO)**
Kerjasama Antar Parlemen ASEAN (AIPO)
- Pertemuan AIPO ke-11
- II. KERJASAMA EKONOMI ASEAN**
- A. Kemanunggalan ASEAN**
- B. Kerjasama Perdagangan dan Pariwisata**
1. Tahun Kunjungan ASEAN
2. Persiapan ATF di Bandung
- C. Kerjasama Industri, Mineral dan Energi**
- Pertemuan Dewan Perminyakan ASEAN
(ASCOPE)
- V. HUBUNGAN ASEAN DENGAN MITRA DIALOG**
- A. Hubungan ASEAN-AS**
- B. Hubungan ASEAN-Jepang**
- Forum ASEAN-Jepang
- C. Hubungan ASEAN-China**
- D. Hubungan ASEAN-Korea Selatan**
- III. KERJASAMA NON-EKONOMI ASEAN**
- A. Kerjasama Kebudayaan dan Informasi**
Lokakarya Penulisan Industri dan Perdagangan
- B. Kerjasama Keamanan**
- Konperensi Keamanan Regional
- VI. USAHA ASEAN MEMBANTU PENYELESAIAN KONFLIK KAMBOJA**
Pertemuan Informal tentang Kamboja (PIK)
1. Persiapan-persiapan
2. Sidang-sidang PIK

I. PERTEMUAN KOMITE TETAP ASEAN KE-24

Pertemuan Komite Tetap ASEAN ke-24 berlangsung di Kuala Lumpur tanggal 4-7 September 1990 untuk membahas struktur dan mekanisme ASEAN terutama Sekretariat ASEAN. Delegasi Indonesia dalam pertemuan itu dipimpin oleh Dirjen ASEAN, Agus Tarmidzi dengan anggota Sunarso Djayusman (Dubes Indonesia untuk Malaysia), Widodo Atmosutjipto (Ditjen ASEAN Deplu), dan Yulius Yatim (Kabid Ekonomi KBRI).

Menteri Luar Negeri Malaysia, Abu Hasan Omar, mengatakan pada pertemuan sidang bahwa: (1) kemampuan Menlu RI, Ali Alatas, yang tinggi serta kebijaksanaanannya telah membimbing pekerjaan komite selama setahun yang lalu patut dihargai; (2) kepemimpinan serta peranan Menlu RI itu telah membawa sukses yang tinggi nilainya dalam Pertemuan AMM/PMC di Jakarta bulan Juli 1990; (3) pembentukan panel untuk meningkatkan Sekretariat ASEAN sesuai dengan keputusan Jakarta bulan Juli 1990 menunjukkan bahwa negara-negara anggota ASEAN telah siap menyempurnakan struktur dan mekanismenya, terutama Sekretariat ASEAN; (4) langkah ini menunjukkan kesiapan negara-negara ASEAN untuk menerima Sekretariat ASEAN yang lebih dinamis dan profesional yang berperanan penting dalam setiap kegiatan ASEAN; (5) ada jabatan baru yaitu Wakil Sekretaris Jenderal ASEAN yang akan segera diisi oleh seorang pejabat dari Singapura (*Angkatan Bersenjata*, 7-9-1990).

Hasil pertemuan antara lain: (1) mereka sepakat untuk mengangkat lima orang anggota panel ASEAN yakni Prof. Dr. Suhadi Mangkusuwondo (staf ahli Menteri Perdagangan Indonesia), Tan Sri Gazali Shafie (mantan Menlu Malaysia), Jacques Pelkmens (peneliti/ahli dari European Policy Studies), Prof. G.E.M. Mills (pakar administrasi) dan Prof. Noordin Sopiee (Dirjen ISIS) sebagai ketua tim yang bertugas menyusun rekomendasi-rekomendasi untuk memperkuat dan menyempurnakan struktur dan mekanisme ASEAN, terutama Sekretariat ASEAN; (2) tim panel akan menyelesaikan tugasnya sebelum bulan Juni 1991 saat berlangsungnya Konferensi Menlu ASEAN di Kuala Lumpur; (3) mereka sepakat mengusulkan KTT ke-4 ASEAN di Singapura tahun 1991, meskipun masih harus menunggu persetujuan para Kepala Negara ASEAN; (4) Pertemuan para Dirjen ke-6 akan dilangsungkan di Muangthai bulan November 1990 untuk membahas perubahan bentuk pertemuan antara Menlu ASEAN dan mitra

dialognya. Perubahan format ini dilakukan agar dalam pertemuan dengan para mitra dialog yang biasanya diselenggarakan setelah pertemuan para Menlu ASEAN dapat dilakukan pembahasan secara lebih mendalam; (5) menunjuk Filipina untuk menyusun suatu kertas kerja mengenai perjanjian kerjasama ekonomi sesuai dengan yang telah diusulkan di Jakarta bulan Juni 1990. Kertas kerja itu harus telah siap untuk dipertimbangkan dalam pertemuan tahunan para Menteri Ekonomi ASEAN bulan Oktober 1990; (6) Pertemuan Komite Tetap yang bertanggungjawab atas penilaian implementasi kegiatan-kegiatan ASEAN selama pertemuan puncak dan tahunan akan bertemu kembali di Penang, Malaysia, tanggal 20-22 November 1990 (*Merdeka*, 7-9-1990).

II. KERJASAMA EKONOMI ASEAN

A. KEMANUNGGALAN ASEAN

Direktur Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI), Christianto Wibisono mengatakan kepada pers di Jakarta tanggal 10 September 1990 bahwa Pertemuan Tingkat Tinggi Bisnis ASEAN Pertama akan diselenggarakan di Singapura, tanggal 2 November 1990 untuk: (1) membahas dan menelusuri serta mengidentifikasi dan mengkaji kekuatan bisnis ASEAN yang secara strategis harus didayagunakan secara maksimal demi kepentingan regional kawasan ini, di mana Indonesia bertindak selaku jangkar dan primus inter pares; (2) membahas profil anatomi ASEAN Incorporated, profil dan anatomi konglomerat ASEAN, total asset dari ASEAN Currency Unit (ACU), dan jumlah perusahaan milik warga ASEAN di Singapura yang tercatat lebih dari 10.000 buah di antaranya 7.000 buah dari Malaysia dan 2.000 buah dari Indonesia (*Business News*, 12-9-1990). Selanjutnya dikatakan pula bahwa: (1) kerjasama bisnis ASEAN perlu diwujudkan dalam bentuk ASEAN Incorporated; (2) jika kemanunggalan dan semangat kerjasama ASEAN terwujud secara tuntas, maka ASEAN tidak memerlukan arus dana atau ketergantungan pinjaman dari luar karena ASEAN sendiri telah menjadi kekuatan ekonomi raksasa. Selain itu juga tidak perlu mengkhawatirkan dominasi *triad power* (Eropa, Jepang dan AS); (3) sampai Februari 1990, total asset unit mata uang Asia yang dimiliki ASEAN di Singapura mencapai US\$334 milyar yang berarti lebih besar daripada gabungan PDB ASEAN maupun Brazil; (4) kekuatan PDB gabungan ASEAN berada di urutan ke-11 dengan jumlah US\$242.440 juta dan Indonesia

mencatat kekuatan PDB tertinggi di ASEAN, yang mencapai US\$83.220 juta, Muangthai US\$57.950 juta, Filipina US\$57.950 juta, Malaysia US\$34.680 juta, Singapura US\$23.880 juta dan Brunei Darussalam US\$3.500 juta. Urutan ini secara berturut-turut berada di bawah Australia, Brazil, Spanyol, RRC, Kanada, Inggris, Italia, Perancis, Jerman Barat, Jepang dan AS (*Antara*, 10-9-1990); (5) menurut skenario geopolitik versi konservatif dengan bias pandangan kelompok Utara, dunia abad ke-21 akan didominasi oleh *triad power* yaitu Eropa di bawah Jerman sebagai lokomotif, Asia-Pasifik yang dipimpin oleh Jepang dan Amerika Serikat akan kembali ke era Doktrin Monroe; (6) skenario ini berbau konflik Utara-Selatan, sebab di satu pihak ketiga kekuatan itu merupakan negara maju Utara dan di lain pihak, sisa dunia merupakan negara Selatan yang miskin dan sedang berkembang termasuk Indonesia; (7) Indonesia berkeyakinan dapat menggerakkan kerjasama ASEAN secara positif, aktif dan menguntungkan seluruh kawasan regional ASEAN yang akan menjadikan ASEAN salah satu dari 5 kekuatan global di luar *triad power* (*Suara Karya*, 11-9-1990).

B. KERJASAMA PERDAGANGAN DAN PARIWISATA

1. Tahun Kunjungan ASEAN

Direktur Eksekutif Pusat Informasi Wisatawan ASEAN merangkap Deputy Dirjen Pengembangan Kepariwisata Malaysia, Abdullah Jonid mengatakan kepada pers di Kuala Lumpur tanggal 3 September 1990 bahwa: (1) kampanye Tahun Kunjungan ASEAN (*Visit ASEAN Year* atau VAY) akan dimulai pada bulan Oktober 1990; (2) sesuai dengan kesepakatan dalam pertemuan sub-komite ASEAN mengenai pariwisata bulan Agustus 1990 terdapat empat kawasan sasaran utama promosi yakni ASEAN sendiri, Jepang, Australia dan Jerman Barat; (3) dalam bulan Oktober 1990 mendarat poster-poster yang diberi tajuk *exotic ASEAN* akan tampak di empat daerah utama promosi yang membeberkan apa yang dapat diperoleh, dilihat, dikerjakan dan dialami di daerah wisata ASEAN; (4) pada bulan Januari 1991 akan diadakan kampanye dalam media masa di Asia Tenggara, kemudian dalam bulan Februari 1991 di Jepang, Australia dan Jerman Barat; (5) dua buah film dengan masa putar 12 dan 24 menit akan diputar di televisi-televisi ASEAN, perusahaan-perusahaan penerbangan nasional ASEAN dan pada misi-misi promosi; (6) kampanye VAY 1992 dite-

kankan pada tema-tema Asia Tenggara, kebudayaan dan tradisi, peninggalan dari zaman dahulu serta tempat-tempat berbelanja. Sedangkan tema yang ditonjolkan adalah ASEAN sebagai rangkaian enam negara yang merupakan satu-satunya di dunia sebagai *Six in One Tropical Paradise*; (7) dalam menghadapi VAY 1992, keenam negara anggota ASEAN sudah diminta untuk menjadi tuan rumah suatu kegiatan tingkat regional Asia Tenggara dan minimal 12 atau sebanyak 30 kegiatan untuk *calender of events of ASEAN Visit Year 1992*. Tetapi sampai saat ini baru Indonesia dan Muangthai yang telah menyampaikan program itu, masing-masing 30 buah; (8) Indonesia telah melaporkan untuk mengadakan kegiatan tingkat Asia Tenggara yang diberi nama *the ASEAN Performing Arts*; (9) promosi dan kampanye VAY selain menggunakan dana dari negara anggota ASEAN sendiri, juga bantuan dari berbagai pihak seperti ASEAN Center di Jepang dan Masyarakat Eropa; (10) dana promosi VAY 1992 yang dikordinasikan oleh Pusat Informasi Pelancongan ASEAN, US\$3 juta telah disetujui dalam pertemuan di Kinibalu, Sabah. Masing-masing negara anggota ASEAN menyumbang US\$500.000. Di samping itu masing-masing negara secara sendiri juga akan mengeluarkan dana sekitar US\$1,27 juta dalam kurun promosi kampanye 9190-1992; (11) ASEAN mengharapkan menerima 22,5 juta orang wisatawan yang akan memasukkan uang US\$21,8 milyar dalam Tahun Kunjungan Wisata ASEAN 1992; (12) Tahun Kunjungan ASEAN 1992 adalah rangkaian dari Tahun Kunjungan Malaysia 1990 dan Tahun Kunjungan Indonesia 1991, sebab kalau Kunjungan Muangthai dan Singapura sudah tiap tahun dan pariwisata di kedua negara itu sudah sangat maju (*Antara*, 4-9-1990).

2. Persiapan ATF di Bandung

Gubernur Jawa Barat, Yogie SM mengatakan kepada pers di Bandung tanggal 14 September 1990 bahwa: (1) Tangkuban Perahu merupakan obyek wisata yang langka, karena kawahnya dapat dilihat dengan kendaraan sampai ke bibir kawah; (2) kawah Tangkuban Perahu perlu dijaga kelestariannya, antara lain dengan mengatur kendaraan berat agar tidak sampai ke bibir kawah untuk menghindarkan longsor; (3) untuk menghadapi ATF (*ASEAN Tourism Forum*) berbagai obyek wisata di Jawa Barat harus direnovasi seperti Tangkuban Perahu dan Ciater; (4) para pengelola obyek wisata agar mampu mengelola dan mengembangkan kepariwisataan sebagai suatu industri yang menguntungkan masyarakat. Selain menyerap tenaga ker-

ja juga mampu mendatangkan pendapatan berupa devisa maupun pendapatan bagi masyarakat sendiri (*Pelita*, 14-9-1990).

C. KERJASAMA INDUSTRI, MINERAL DAN ENERGI

Pertemuan Dewan Perminyakan ASEAN (ASCOPE)

Pertemuan Dewan Perminyakan ASEAN (ASCOPE atau *Annual Meeting ASEAN Council of Petroleum*) ke-26 berlangsung di Jakarta tanggal 7-8 September 1990 diikuti oleh keenam anggota ASEAN masing-masing dipimpin oleh Dato Seri Laila Jasa Awang Haji Abu Bakar bin Haji Apong (Brunei Darussalam), Tan Sri Datuk Azizan Zainul Abidin (Malaysia), Manuel A. Esterella (Filipina), Cheng Hong Kok (Singapura), Arbhahirama (Muangthai) dan Faisal Abda'oe (Indonesia).

Menko Ekuin/Pengawas Pembangunan RI, Radius Prawiro mengatakan pada pertemuan itu bahwa: (1) negara-negara anggota ASCOPE agar segera mengambil langkah bersama untuk menyesuaikan sasaran-sasaran dan rencana mereka secara tepat guna mengatasi drastisnya perubahan-perubahan dalam perekonomian dunia; (2) sementara negara anggota ASCOPE menyesuaikan suatu komitmen bersama menuju kesetiakawanan menyangkut masalah ekonomi, perubahan-perubahan global telah mempengaruhi cara mereka melaksanakan komitmen itu; (3) perubahan ekonomi global merupakan tantangan bagi negara-negara anggota ASCOPE untuk menemukan cara-cara baru yang dapat memperkuat hubungan antar mereka serta menemukan jalan untuk mengatasi masalah-masalah itu; (4) sulit diduga bahwa hanya dalam waktu sepuluh hari pertama bulan Agustus 1990 industri perminyakan akan mengalami perubahan dramatis dan membawa banyak negara ke arah resesi serta mengancam stabilitas ekonomi global; (5) negara anggota ASCOPE sebagai suatu kelompok menghadapi kesulitan untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan-perubahan drastis seperti itu; (6) patut disayangkan, langkah-langkah para anggota ASCOPE terbatas pada tindakan-tindakan yang sering diambil dan hanya merupakan reaksi yang hanya dapat menolong dalam jangka pendek; (7) jika krisis di kawasan Teluk segera menyebar, akibatnya akan tetap terasa sampai hukum penawaran dan permintaan mencapai suatu keseimbangan baru yang stabil; (8) apa yang

tampak dalam jangka pendek dan mungkin dalam jangka menengah adalah bahwa harga minyak bumi mungkin akan mencapai keseimbangan pada tingkat harga tidak lebih rendah daripada US\$20 per barel; (9) pada saat-saat seperti ini ada relevansinya bagi negara anggota ASCOPE untuk mempertimbangkan apa yang dapat dilakukan sebagai suatu kelompok guna membatasi dampak dari krisis Teluk pada perekonomian ASEAN; (10) melalui dialog dan saling membantu sesama anggota ASEAN tentu akan memberikan keuntungan secara bersama baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang; (11) kerjasama ASCOPE sangat penting sebab ketergantungan kawasan Asia-Pasifik pada minyak Timur Tengah begitu besar. Bila pada tahun 1985 ketergantungan mencapai 63%, maka di tahun 1995 mendatang dapat meningkat menjadi 83% dan di tahun 2000 menjadi 90% (*Business News*, 7-9-1990). Lebih lanjut dikatakan bahwa: (1) tanpa ada usaha mengurangi pemakaian energi dan penemuan sumber minyak baru, diperkirakan ekspor minyak dari sebagian besar negara-negara produsen di Asia-Pasifik akan menurun tajam, dari 1,8 juta barel pada tahun 1990 menjadi 1,2 juta barel pada tahun 1995. Bahkan kemungkinan dapat mencapai kurang dari 500.000 barel pada tahun 2000; (2) para negara anggota ASCOPE di negaranya masing-masing diharapkan dapat memprioritaskan pemanfaatan energi di luar minyak; (3) negara anggota ASCOPE masih dapat meningkatkan kerjasamanya untuk memperbaiki ekonominya dengan mengembangkan sumber energi yang dimilikinya seperti LNG, LPG, batubara atau tenaga air, mengingat kebutuhannya akan semakin meningkat di masa mendatang; (4) sumber energi sangat penting dalam rangka pertumbuhan ekonomi, namun untuk mengembangkan atau mencari energi alternatif yang tidak kalah pentingnya adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan lingkungan; (5) Indonesia mengupayakan sumber-sumber energi seefisien mungkin dengan memperhatikan penggunaan di dalam negeri; (6) hampir 60% minyak Indonesia yang diekspor pada tahun 1989, kurang lebih tiga perempatnya ditujukan ke negara-negara di wilayah Asia-Pasifik; (7) diperkirakan cadangan minyak Indonesia mencapai sekitar lebih 48 milyar barel dan diharapkan Indonesia dapat mengembangkan suplainya sampai abad ke-21; (8) sumber energi yang sedang dikembangkan di Indonesia adalah batubara, yang pada tahun 1989 sudah ditambang sekitar 8,8 juta ton dan 2,5 juta ton di antaranya diekspor; (9) salah satu energi yang dapat dikembangkan dalam bentuk kerjasama regional adalah energi gas alam cair (LNG); (10) Indonesia sudah mencairkan LNG sekitar

18,7 juta ton dan menempatkan sebagai negara produsen LNG terbesar di dunia. (*Angkatan Bersenjata*, 7-9-1990).

Seusai pembukaan pertemuan, Direktur Utama Pertamina Faisal Abdoe mengatakan pada pers bahwa: (1) impor minyak mentah pengganti minyak Irak bagi kebutuhan kilang Cilacap sudah dilakukan dengan membeli di pasar tunai; (2) pembelian minyak di *spot market* (pasar tunai) untuk menghindari kelangkaan bahan baku kilang Cilacap yang merupakan kilang yang memproduksi BBM dan pelumas bagi kebutuhan dalam negeri; (3) meskipun idealnya pembelian dilakukan ke negara produsen seperti Arab Saudi, tetapi karena prosedurnya cukup lama dan permintaannya besar, Pertamina terpaksa mencari jalan pintas dengan membeli di *spot market* untuk menghilangkan kekhawatiran atas persediaan bahan baku bagi kebutuhan kilang Cilacap; (4) Pertamina akan berusaha mencari jalan keluar sebagai konsekuensi penghentian impor minyak mentah dari Irak akibat krisis Teluk; (5) kilang Cilacap membutuhkan 100.000 barel minyak mentah jenis ALC per hari dan kebutuhan ini dilayani Irak 50.000 barel, Iran 10.000 barel dan sisanya dari Arab Saudi; (6) pembelian minyak mentah dari Irak dan Iran dilakukan dengan ekspor komoditi non-migas dari Indonesia; (7) kelancaran ekspor migas Indonesia akibat krisis di Teluk Parsi tidak mengalami gangguan, sebab sebagian besar ekspor migas Indonesia untuk pasaran Jepang; (8) meskipun ada tambahan permintaan minyak mentah dari Jepang akibat krisis Teluk, namun permintaan itu tidak dapat dipenuhi karena adanya komitmen terbatas dan bukan karena harga; (9) setiap kenaikan harga minyak mentah sebesar US\$1 per barel, penerimaan negara akan bertambah US\$200 juta (*Merdeka*, 7-9-1990).

Pernyataan bersama pada akhir pertemuan antara lain: (1) menyambut gembira berlanjutnya kerjasama negara anggota ASEAN yang telah menghasilkan kemajuan besar dalam sektor perminyakan; (2) merasa puas atas kemajuan yang dicapai oleh proyek ASCOPE yang dilaksanakan dengan kerjasama antar organisasi ilmiah dan teknik internasional seperti *Committee for Coordination for Joint Prospecting for Mineral Resources in Asia Offshore Area (CCOP)*, *Norwegia Engineering Committee on Oceania Resources (Norway-Necor)* dan *Petrand/Norwegian Petroleum Directorate*; (3) anggota ASCOPE akan melanjutkan tukar-menukar informasi mengenai berbagai pokok permasalahan seperti kerjasama dan saling memenuhi kebutuhan dalam pembelian minyak mentah dan produk-produknya, memberikan

data-data mutakhir mengenai kegiatan eksplorasi dan produksi masing-masing, kerjasama dalam *training* dan saling memberikan keikhlasan serta fasilitas *training*; (4) melakukan kerjasama yang lebih erat antar anggota untuk memberikan responden secepatnya untuk saling membantu anggota yang terkena krisis Teluk; (5) Dewan ASCOPE ikut prihatin dan berharap agar krisis Teluk dapat diselesaikan secara damai; (6) *ASCOPE Games* akan diselenggarakan di Singapura pada tanggal 28-30 September 1990 dan di Brunei Darussalam pada bulan November 1991 (*Angkatan Bersenjata*, 13-9-1990).

III. KERJASAMA NON EKONOMI ASEAN

A. KERJASAMA KEBUDAYAAN DAN INFORMASI

Lokakarya Penulisan Industri dan Perdagangan

Lokakarya Penulisan Industri dan Perdagangan Regional ASEAN berlangsung di Batam tanggal 3-15 September 1990, diikuti oleh 18 wartawan dari lima negara anggota ASEAN (Indonesia, Muangthai, Malaysia, Filipina, dan Singapura) serta dua wartawan Indonesia sebagai peninjau. Lokakarya itu selain untuk bertukar pikiran juga untuk menerima tambahan pengetahuan tentang penulisan masalah ekonomi dari dua orang insstruktur dari IIG-Berlin yakni Graham Watts dan Peter Profets. Di samping itu para peserta juga akan meninjau berbagai pusat industri dan perdagangan di Batam, Johor, Singapura dan Bangkok (*Merdeka*, 11-9-1990).

Ketika menerima rombongan wartawan ASEAN peserta Lokakarya Penulisan Industri dan Perdagangan dan Sidang Dewan Direktur CAJ di Johor Baru tanggal 8 September 1990, Menteri Besar Johor (Malaysia), Tan Sri Muhjiddin Mohd. Yasin mengatakan bahwa: (1) konsep kerjasama Singapura-Batam-Johor atau yang lebih dikenal Segitiga Pertumbuhan (*Growth Triangle*) bila benar dapat direalisasikan hal itu akan memperkokoh kerjasama ekonomi ASEAN; (2) kerjasama ekonomi sub-regional seperti konsep Segitiga Pertumbuhan Singapura-Batam-Johor lebih tepat dan lebih dapat diwujudkan secara konkrit daripada konsep kerjasama regional, mengingat ASEAN lebih merupakan suatu kelompok politik regional daripada sebagai kekuatan ekonomi regional; (3) konsep-konsep kerjasama sub-regional seperti halnya Segitiga Pertumbuhan di luar

kawasan Singapura-Batam-Johor diharapkan akan berkembang guna memperkokoh kerjasama regional antar negara anggota ASEAN; (4) mengingat kesenjangan perkembangan ekonomi ketiga daerah itu, maka realisasi konsep *Growth Triangle* perlu diupayakan sedemikian rupa sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan bersama secara adil oleh ketiganya; (5) pembangunan Batam dan Johor perlu dipacu agar mampu bekerjasama secara serasi dengan Singapura yang perekonomiannya jauh lebih maju dibandingkan dengan kedua daerah itu; (6) karena kemacetan lalu-lintas darat yang menghubungkan Singapura-Johor, investor Singapura kini lebih banyak memalingkan perhatian ke Batam daripada Johor. Investor Singapura lebih tertarik untuk pergi ke Batam yang dapat ditempuh dengan ferry hanya dalam waktu 20 menit.

Pada saat yang sama, Asisten General Manager Otorita Pelabuhan Johor, Mohd. Asman Aris MSc. mengatakan bahwa: (1) lebih dari 60% ekspor minyak sawit Malaysia dikapalkan melalui pelabuhan ini; (2) konsep kerjasama Segitiga Pertumbuhan akan memacu kompetisi pembangunan di ketiga wilayah itu; (3) pelabuhan Johor siap mendukung realisasi konsep kerjasama Segitiga Pertumbuhan; (4) pelabuhan Johor dioperasikan sejak tahun 1977 dan merupakan satu-satunya pelabuhan di Malaysia yang terletak di dalam kawasan Perdagangan Bebas (*Free Trade Zone* atau FTZ); (5) sejak tahun 1984 pelabuhan Johor diberi wewenang untuk mengelola FTZ, sehingga peran pelabuhan ini makin meningkat khususnya untuk menunjang kegiatan perdagangan nasional, regional dan internasional (*Antara*, 11-9-1990).

B. KERJASAMA KEAMANAN

- *Konperensi Keamanan Regional*

Menlu Filipina, Raul Manglapus mengatakan kepada pers di Manila tanggal 12 September 1990 bahwa: (1) ASEAN telah merencanakan sebuah konperensi keamanan regional untuk membahas masalah keamanan dalam dasar yang bersifat non-ASEAN; (2) ASEAN telah sepakat untuk tidak membicarakan permasalahan yang berkaitan dengan keamanan dalam kerangka ASEAN; (3) beberapa lembaga telah mengadakan studi teknis mengenai masalah keamanan regional itu dan hasilnya akan dapat dipakai dalam konperensi mendatang; (4) tampaknya pertemuan para menlu ASEAN mengenai masalah keamanan regional baru akan berha-

sil bila lebih dulu diadakan pertemuan-pertemuan yang sifatnya bilateral; (5) perundingan mengenai masalah keamanan regional sendiri tidak perlu tergantung pada masalah pangkalan AS di Filipina yang masa sewanya akan berakhir bulan September 1991; (6) bulan September 1990 pemerintah Filipina dan AS telah mengadakan pembicaraan mengenai masa depan pangkalan AS di Filipina (*Kompas*, 13-9-1990).

IV. KERJASAMA NON-PEMERINTAH (NGO)

KERJASAMA ANTAR PARLEMEN ASEAN (AIPO)

- *Pertemuan AIPO ke-11*

Pertemuan Organisasi Antar Parlemen ASEAN (AIPO) ke-11 berlangsung di Singapura tanggal 10-15 September 1990, dihadiri oleh semua anggota AIPO, kecuali Brunei Darussalam karena tidak mempunyai parlemen yang dipilih dari hasil pemilu, sedangkan delegasi dari Australia, Kanada, Korea Selatan dan Papua Nugini akan hadir sebagai peninjau. Pertemuan itu membahas: (1) masalah krisis Teluk Parsi; (2) penyelesaian konflik Kamboja; (3) masalah pengungsi Indocina; (4) kerusuhan di Kashmir; (5) perkembangan Afrika bagian Selatan dan Eropa; (6) kerjasama regional ASEAN di berbagai bidang; (7) masalah kerjasama ekonomi Asia-Pasifik (APEC) yang baru dibentuk. Pertemuan ini juga untuk memilih Sekjen AIPO yang baru untuk menggantikan Clerk Abilio dari Singapura yang meletakkan jabatan (*Antara*, 10-9-1990).

Sekretaris Nasional AIPO DPR-RI, Sofyan Noor mengatakan kepada pers di Jakarta tanggal 8 September 1990 bahwa: (1) delegasi Indonesia ke Sidang AIPO ke-11 terdiri atas 17 orang dan dipimpin oleh Ketua DPR/MPR-RI, M. Kharis Suhud; (2) kertas kerja dan naskah resolusi delegasi Indonesia menyangkut: (a) masalah politik, seperti Kamboja, pengungsi Indocina, ZOPFAN, Timur Tengah, Afrika Selatan, serta KTT Presiden AS, George Bush, dengan Presiden Uni Soviet, Mikhail Gorbachev; (b) masalah sosial antara lain kerjasama ASEAN di bidang lingkungan hidup, kesehatan, kebudayaan, kependudukan, riset dan latihan, program pemuda dan pemimpin politik muda, program bersama mengatasi pelanggaran narkoba dan rehabilitasinya serta ketenagakerjaan; (c) bidang ekonomi, seperti kerjasama ekonomi Asia-Pasifik (APEC) dan pra-

karsa ASEAN untuk mengatasi proteksionisme perdagangan (*Antara*, 9-9-1990).

Sementara itu, Ketua DPR/MPR-RI, M. Kharis Suhud mengatakan kepada Antara di Singapura, tanggal 10 September 1990 bahwa: (1) Sidang AIPO ke-11 selain diharapkan dapat memperkokoh Persetujuan Jakarta mengenai pembentukan Sekretariat Tetap AIPO di Ibukota RI, juga diharapkan dapat menetapkan pos Sekjen AIPO yang pertama dari Indonesia dan wakilnya dari Muangthai; (2) masalah Kamboja harus diselesaikan oleh pihak-pihak Kamboja sendiri, sedangkan Indonesia hanya menyediakan tempat dan fasilitas agar mereka dapat bertemu; (3) penyelesaian masalah Kamboja sangat penting bagi Indonesia, karena di samping melaksanakan apa yang tertuang dalam Pembukaan UUD '45, Indonesia dan anggota ASEAN lainnya juga ingin mewujudkan ZOPFAN; (4) bagi Indonesia penyelesaian konflik Kamboja harus diusahakan, bila tidak berhasil lewat JIM harus diusahakan dengan cara lain; (5) dalam setiap masalah, apalagi yang menimbulkan bentrokan senjata, harus dicegah dan masalah itu harus disalurkan ke meja perundingan agar dapat diselesaikan melalui perundingan, bukan melalui penggunaan senjata; (6) mengingat kemampuan Indonesia untuk ikut menyelesaikan masalah sangat terbatas, maka langkah yang diambil adalah mendukung prakarsa PBB, sebab PBB merupakan tempat keluarga bangsa-bangsa menyelesaikan masalah yang dapat menimbulkan konflik; (6) sidang tidak akan membahas perubahan di Eropa Timur secara eksplisit, kecuali ada usul untuk memahasnya; (7) perubahan di Eropa Timur dan Uni Soviet merupakan hal yang positif, karena minimal telah mengurangi bahaya dan ancaman komunis bukan saja bagi Indonesia tetapi juga negara anggota ASEAN lainnya; (8) Indonesia dan ASEAN harus selalu hati-hati, sebab kekacauan tidak hanya timbul dari komunis semata, tetapi kegagalan mewujudkan keadilan dan pemerataan juga dapat menimbulkan pergolakan sosial; (9) usul pembentukan Parlemen ASEAN masih perlu dipelajari sebab ada perbedaan unsur-unsurnya misalnya di Eropa Barat partainya sama sedangkan di ASEAN partainya berbeda-beda, sehingga perlu pertimbangan yang lebih matang (*Antara*, 11-9-1990).

Deputi I Perdana Menteri Singapura, Goh Chok Tong mengatakan pada Pembukaan Sidang AIPO ke-11 bahwa: (1) negaranya mengharapkan peningkatan kerjasama ekonomi di wilayah ASEAN sebab pertumbuhan ekonomi di wilayah ini akan memberikan satu

dimensi baru; (2) ASEAN akan membuat wilayah ini lebih menarik untuk perdagangan dan penanaman modal; (3) pertumbuhan ekonomi *the Growth Triangle* yang terdiri dari Singapura, Johor di Semenanjung Malaya dan Riau di Indonesia diharapkan akan dilakukan juga antara Sumatera Utara, Malaysia bagian utara dan Muangthai bagian selatan; (4) ASEAN bertindak tepat karena telah mengembangkan satu pengertian yang lebih baik atas masing-masing masalah dan perbedaan karakteristik bangsa; (5) ASEAN penting bagi seluruh anggotanya karena dapat digunakan sebagai satu alat untuk mencapai keseimbangan; (6) ASEAN memungkinkan para anggotanya untuk menghadapi bahaya dan keadaan yang tidak menentu secara bersama.

Sementara itu, Presiden AIPO dan jubi Parlemen Singapura, Tan Soo Khoon mengatakan bahwa: (1) bangsa-bangsa ASEAN harus mengambil langkah-langkah untuk menjamin masuknya penanaman modal, terutama dari AS, Jepang dan Eropa Barat; (2) dukungan ASEAN untuk meningkatkan kerjasama ekonomi Asia-Pasifik merupakan satu langkah tepat untuk menarik penanaman modal (*Kompas*, 12-9-1990).

Dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Ketua DPR/MPR-RI, M. Kharis Suhud, Presiden Soeharto mengatakan bahwa: (1) pulihnya hubungan diplomatik antara Indonesia dan RRC, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi ASEAN serta perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia-Pasifik dan dunia pada umumnya; (2) kekuatan pokok ASEAN terletak pada kemampuannya menolong diri sendiri dan baikny hubungan kerjasama; (3) untuk menggunakan kekuatannya guna mencapai tujuan dan cita-cita ASEAN, Parlemen menduduki tempat yang khusus; (4) Sidang AIPO ke-11 hendaknya memberikan sumbangan untuk lebih memperkokoh ASEAN dan mewujudkan perdamaian di Asia Tenggara dan dunia; (5) hal-hal yang telah dicapai ASEAN dan besarnya tekad rakyat negara anggotanya untuk mengembangkan rasa persahabatan, kerjasama dan saling mengerti, tentu akan dapat menjadi landasan yang kokoh bagi kegiatan AIPO untuk mempererat tali persaudaraan antara bangsa-bangsa ASEAN; (6) ASEAN telah tumbuh dengan akar-akarnya yang makin luas di dalam masyarakat; (7) ASEAN membuktikan bahwa bangsa-bangsa dengan kebudayaan dan latar belakang yang berbeda-beda dapat bersatu padu mencapai cita-cita dan tujuannya; (8) satu hal yang membanggakan adalah semakin mantapnya kerjasama ASEAN, sehingga ASEAN menjadi kawasan yang se-

makin diperhitungkan dalam percaturan politik regional maupun internasional; (9) dialog yang diadakan dan prakarsa-prakarsa untuk memecahkan berbagai masalah, seperti pengungsi Indocina, realisasi ZOP-FAN, pencapaian kawasan bebas nuklir (NWFZ) dan masalah Kamboja telah semakin memperluas peranan ASEAN di dunia internasional; (10) pada akhirnya penyelesaian masalah suatu bangsa akan bergantung pada bangsa itu sendiri, yang harus dapat menempatkan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi serta kelompok, sedangkan bangsa lain hanya dapat membantu; (11) dunia kita ini sedang berada dalam proses perubahan yang cepat dan mendasar, seperti misalnya yang terjadi di Eropa Timur; (12) meskipun ketegangan Timur dan Barat telah makin berkurang, tetapi ketegangan dan pertikaian yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan baru masih tetap berlangsung di kawasan lain seperti di Asia, Afrika dan Amerika Latin; (13) ketegangan di Timur Tengah sangat memprihatinkan dan bila tidak segera diatasi secara damai akan dapat membahayakan perdamaian dan gejolak ekonomi dunia; (14) perjuangan rakyat Afrika untuk membebaskan diri dari penjajah dan penindasan tidak akan selesai sebelum sistem apartheid yang dikutuk dunia itu tercabut dan diganti dengan suatu pemerintahan demokratis yang non-rasial; (15) perekonomian dunia akan terus mengalami berbagai perubahan serta dibayang-bayangi oleh kesulitan besar dan penuh ketidakpastian; (16) gejala proteksionisme masih belum menyurut bahkan ada tanda-tanda meningkat, sedangkan masalah Utara-Selatan belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian kearah keadilan; (17) beban hutang luar negeri negara-negara yang sedang membangun masih merupakan masalah berat; (18) masih banyaknya masalah dunia yang harus diatasi oleh dunia, dan ASEAN tidak mungkin menghindarkan diri dari keadaan tersebut; (19) ASEAN selain harus tepat menentukan arah pembangunannya di masa mendatang, juga harus dapat mengambil manfaat yang positif dari bersatunya ekonomi Masyarakat Eropa menjadi Pasar Tunggal; (20) ASEAN harus dapat mengambil manfaat atas terjadinya perkembangan di negara-negara dengan sistem ekonomi terpusat yang sedang bergerak menjadi ekonomi pasar serta kemungkinan bergesernya pusat kegiatan ekonomi dan pembangunan dari kawasan Atlantik menuju kawasan Pasifik (*Pelita*, 12-9-1990).

Sementara itu, Ketua Delegasi Indonesia, M. Kharis Suhud mengatakan kepada pers di Singapura tanggal 12 September 1990 bahwa: (1) proses cara baru detente dan koalisi antara negara-negara besar telah membuka ke-

sempatan dan tantangan yang lebih besar atas usaha yang terus-menerus dilakukan oleh umat manusia untuk mencapai suatu dunia yang lebih baik dan aman; (2) perubahan radikal telah terjadi di Eropa dengan runtuhnya tembok Berlin dan demokratisasi negara-negara Eropa Timur serta Uni Soviet; (3) langkah Uni Soviet mengalihkan perhatiannya pada masalah-masalah domestik dan unifikasi Jerman mengisyaratkan suatu arsitektur Eropa yang baru samasekali; (4) meningkatnya ketegangan politik dan militer di Teluk Parsi akibat penyerbuan pasukan Irak ke Kuwait dan pendudukan-nya atas negeri itu sangat memprihatinkan. Semua pihak yang terlibat agar dapat mengendalikan diri untuk tidak menggunakan cara militer untuk menyelesaikan masalah itu; (5) persoalan yang menjadi pusat perhatian ASEAN adalah berlanjutnya arus masuk para pengungsi, orang-orang terlantar dan emigran gelap dari Indocina, terutama orang-orang perahu yang mencari suaka di negara-negara ASEAN; (6) arus pengungsi Indocina yang terus-menerus mengalir telah menimbulkan masalah sosial, ekonomi, politik dan keamanan bagi negara penampung sementara serta menimbulkan ketegangan antara negara penampung sementara, negara asal pengungsi dan negara ketiga yang akan memukimkan mereka; (7) penyelesaian langgeng atas masalah pengungsi hanya dapat dicapai jika persoalan itu ditangani secara tuntas sampai ke akar-akarnya; (8) Vietnam harus mengambil langkah yang lebih efektif untuk mencegah kepergian secara gelap para pengungsi itu dan menjamin pelaksanaan program pemberangkatan secara tertib (*Antara*, 13-9-1990).

Sedangkan Ketua Delegasi Muangthai, Snong Rodphotong mengatakan bahwa: (1) masalah Kamboja sudah mencapai saat yang genting dan ASEAN telah berusaha keras untuk meyakinkan masyarakat dunia agar mendukung usul ASEAN untuk menyelesaikan masalah ini; (2) sampai saat ini ASEAN belum juga berhasil mencapai penyelesaian secara luas atas konflik Kamboja; (3) ASEAN harus terus-menerus memperkokoh peranannya untuk mewujudkan perdamaian total di kawasan Asia Tenggara.

Ketua Delegasi Filipina, Antonio V. Cuanco mengatakan bahwa: (1) negaranya sangat menaruh perhatian atas nasib para tenaga kerja di luar negeri, terutama dalam kaitannya dengan krisis Teluk saat ini, sebab beberapa negara anggota ASEAN adalah pengeksport tenaga kerja yang besar; (2) penting bagi AIPO untuk memikirkan soal perlindungan para tenaga kerja di luar negeri melalui koordinasi legislatif; (3) ASEAN perlu

menyeragamkan hukum tentang kejahatan yang berkaitan dengan obat bius serta perompakan di sepanjang jalur pelayaran bersama.

Ketua Delegasi Singapura, Wong Kan Seng mengatakan bahwa: (1) pihak-pihak di Kamboja sudah setuju untuk membentuk Dewan Nasional Tertinggi (SNC) Kamboja; (2) Singapura sangat gembira atas hasil Pertemuan Jakarta karena hasil itu merupakan terobosan besar; (3) ia menyampaikan selamat kepada Menlu Indonesia, Ali Alatas, dan Menlu Perancis, karena telah memainkan peranan utama untuk mempertemukan fraksi-fraksi Kamboja serta membuat mereka sepakat untuk membentuk SNC (*Antara*, 13-9-1990).

Hasil sidang antara lain: (1) menetapkan Johan Boudewijn Paul Maramis dari Indonesia sebagai Sekjen AIPO yang pertama dan Burirak Namwat dari Muangthai sebagai Deputi Sekjen, yang mulai berlaku sejak berakhirnya SU AIPO ke-11; (2) memutuskan letak Sekretariat Tetap AIPO di Gedung DPR-RI di Jakarta; (3) menetapkan Ketua Parlemen Muangthai, Panja Kesornthong sebagai Presiden baru AIPO menggantikan Ton Soo Khoon; (4) menetapkan Muangthai sebagai tuan rumah SU AIPO ke-12 yang akan diselenggarakan tanggal 16-21 September 1990; (5) menetapkan jabatan Presiden AIPO diganti setiap tahun, sedangkan jabatan Sekjen AIPO dan Wakil Sekjen diganti tiga tahun sekali; (6) sepakat memberi gelar kehormatan Bapak AIPO (Mr. AIPO) kepada Pathmanaban sebagai pengakuan atas jasa-jasanya bagi organisasi ini. Dalam komunikasi bersama yang ditandatangani oleh Presiden AIPO, Tan Soo Khoon (Singapura), dan para Ketua Delegasi yakni Saiful Sulun (Wakil Ketua MPR/DPR-RI), Dato K. Pathmanaban (Malaysia), Wong Kan Seng (Singapura), Antonio V. Cuenco (Filipina), dan Sngong Rodphotong (Muangthai) menyebutkan antara lain: (1) AIPO mendukung sepenuhnya kerangka penyelesaian PBB bagi konflik Kamboja yang telah disepakati oleh kelima negara anggota tetap DK PBB bulan Agustus 1990; (2) kerangka penyelesaian menyerukan pembentukan Dewan Nasional Tertinggi (SNC) Kamboja yang memerintah negeri itu sampai pemilihan umum diselenggarakan, verifikasi gencatan senjata, pengawasan perlucutan senjata, pengorganisasian pemilihan umum dan menjamin penarikan seluruh pasukan Vietnam keluar dari Kamboja; (3) AIPO menyambut baik kesepakatan faksi-faksi Kamboja untuk mendukung kelima kerangka penyelesaian yang dicapai oleh kelima anggota tetap DK PBB; (4) AIPO mendukung pembentukan SNC, dan memandang SNC sebagai organisasi yang seharusnya

menyederajatkan kursi Kamboja di PBB; (5) suatu penyelesaian hanya dapat dicapai melalui proses perundingan, yaitu Konperensi Internasional Paris tentang Kamboja (PICC) dan bukan dengan cara militer; (6) mengucapkan selamat dan menyatakan penghargaan kepada Menlu RI, Ali Alatas serta kepada Perancis, karena dinilai telah memainkan peranan penting untuk mempertemukan faksi-faksi Kamboja dan membuat mereka setuju membentuk SNC. Di samping itu penghargaan serupa juga diberikan kepada kelima negara anggota tetap DK PBB; (7) AIPO mendesak agar pemimpin perlawanan Kamboja, Pangeran Sihanouk menerima jabatan kepemimpinan SNC; (8) menghimbau faksi-faksi di Kamboja agar mengesampingkan kepentingan diri sendiri demi kepentingan seluruh bangsa Kamboja; (9) AIPO prihatin atas terus meningkatnya arus masuk pengungsi Indocina ke negara-negara ASEAN, karena menimbulkan masalah ekonomi, politik dan keamanan dalam negara-negara penampung sementara (CTR), juga menimbulkan ketegangan antara CTR dan negara-negara yang memukimkan kembali para pengungsi; (10) mendukung resolusi-resolusi DK PBB mengenai invasi pasukan Irak ke Kuwait dan pencaplokan Irak atas negara tetangganya itu; (11) menyerukan agar kepulauan seluruh warga asing yang berada di Irak ke tanah air mereka masing-masing jangan dihalangi; (12) menyambut baik KTT Pertama G-15 di Kuala Lumpur, tanggal 1-3 Juni 1990 dan forum itu agar dapat lebih memperkokoh kerjasama Selatan-Selatan serta dialog Utara-Selatan; (13) AIPO mendukung seruan para Menlu ASEAN untuk menyelenggarakan KTT ASEAN IV; (14) KTT ASEAN IV diharapkan akan lebih memperkokoh kerjasama ekonomi ASEAN, termasuk perdagangan antar ASEAN (*Antara*, 16-9-1990).

V. HUBUNGAN ASEAN DENGAN MITRA DIALOG

A. HUBUNGAN ASEAN-AS

Dialog ASEAN-AS ke-9 berlangsung di Bangkok tanggal 2-3 September 1990, dihadiri oleh 94 orang dari kedua belah pihak untuk membahas masalah perdagangan, Babak Uruguay, politik, pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pejabat Kementerian Luar Negeri Muangthai mengatakan pada pembukaan itu bahwa: (1) kerjasama ekonomi dan bidang-bidang lainnya perlu ditingkatkan agar dapat mengatasi segala hambatan; (2) kesenjangan

ekonomi di antara negara-negara ASEAN menghambat proses integrasi pasar ASEAN (*Antara*, 3-9-1990).

Dialog sepakat untuk: (1) mempererat hubungan ekonomi dengan melibatkan sektor swasta dari kedua belah pihak. Proyek penanaman modal swasta dan kesempatan dagang (PITO) menjadi contoh bagi investor untuk meningkatkan perdagangan dan penanaman modal; (2) mengadakan pembatasan-pembatasan kebijaksanaan perdagangan dan pengembangan pasar modal dengan mendukung pembentukan dana pengembangan ASEAN untuk membiayai usaha patungan ASEAN-AS; (3) mengadakan perundingan mengenai masalah perdagangan multilateral Babak Uruguay terutama mengenai bantuan pertanian dan proteksi; (4) menyelesaikan masalah hambatan pengembangan dan penanaman modal (*Antara*, 4-9-1990).

B. HUBUNGAN ASEAN-JEPANG

Forum ASEAN-Jepang

Forum ASEAN-Jepang ke-12 berlangsung di Tokyo tanggal 19-20 September 1990, dihadiri oleh para pejabat Kemlu Jepang, delegasi keenam anggota ASEAN dan kalangan swasta dari kedua pihak, untuk membahas masalah kerjasama ekonomi dan perundingan Babak Uruguay.

Dirjen ASEAN, Agus Tarmidzi, mengatakan pada pembukaan pertemuan itu bahwa: (1) meskipun masih banyak hambatan, hubungan kerjasama ekonomi perdagangan Jepang-ASEAN mencapai kemajuan; (2) untuk pertama kalinya forum ASEAN-Jepang ini melibatkan kalangan swasta; (3) Jepang mendukung aspirasi ASEAN mengenai perundingan Babak Uruguay yang akan selesai akhir tahun 1990; (4) Jepang agar meningkatkan impor dari negara-negara ASEAN, baik produk semi manufaktur maupun manufaktur; (5) selama ini impor Jepang dari ASEAN terpaku pada produk bahan baku tradisional; (6) Jepang diharapkan dapat membantu diversifikasi komoditi, terutama dalam pengembangan sumber daya alam dan pengembangan penelitian dan pengembangan; (7) mengenai masalah Babak Uruguay, Jepang menunjukkan sikap luwes. Misalnya di bidang pertanian, Jepang mendukung sikap ASEAN yang menghendaki penghapusan subsidi, juga di bidang perdagangan tekstil dan pakaian jadi; (8) ASEAN meminta kesediaan Jepang untuk memberikan akses bagi produk komoditi ekspor non-migas (*Antara*, 20-9-1990).

Dirjen Biro Asia Jepang, Sakutaro Tanino, mengatakan bahwa: (1) belum ada kepuasan dalam pengelolaan proyek-proyek kerjasama ekonomi Jepang-ASEAN; (2) ASEAN menyayangkan tindakan Jepang atas proyek yang tidak diterima; (3) Jepang tidak dapat memenuhi proyek yang diajukan ASEAN karena datanya kurang lengkap; (4) perlu ada kesatuan kebijakan yang menyangkut data proyek di antara negara-negara ASEAN (*Antara*, 12-9-1990).

Dalam pertemuan itu pihak ASEAN: (1) mendesak Jepang untuk mendukung posisi ASEAN pada perundingan Babak Uruguay dan menyetujui tuntutan ASEAN dalam perundingan mengenai perdagangan tekstil, hasil-hasil pertanian dan produk-produk tropis; (2) prihatin atas tidak ada keseimbangan antara neraca perdagangan ASEAN dan Jepang; (3) mendesak Jepang agar mengimpor lebih banyak barang jadi dan setengah jadi dari negara-negara ASEAN; (4) menghimbau Jepang untuk memberikan bantuan pembangunan sosial dan proyek-proyek khusus yang dapat memajukan proses alih teknologi dari Jepang.

Pihak Jepang menyatakan: (1) bersedia membantu ASEAN untuk mengupayakan penyelesaian perundingan perdagangan multilateral (GATT); (2) puas atas peningkatan perdagangan dan kegiatan investasi yang cukup besar antara Jepang dan ASEAN; (3) peningkatan perdagangan dan investasi membuktikan bahwa upaya penyesuaian struktural dan kebijakan di bidang industri dan perdagangan yang dilakukan negara-negara ASEAN selama ini sudah tepat; (4) akan meningkatkan kerjasama di bidang pelestarian lingkungan hidup.

Pernyataan bersama mengatakan: (1) Jepang dan ASEAN mengharapkan perundingan perdagangan multilateral Babak Uruguay selesai akhir tahun 1990 demi masa depan perdagangan internasional; (2) kedua pihak setuju bahwa penyelenggaraan Forum ASEAN-Jepang ke-13 tahun 1992 di Singapura (*Antara*, 22-9-1990).

C. HUBUNGAN ASEAN-CINA

PM Cina, Li Peng, mengatakan di Singapura tanggal 12 Agustus 1990 bahwa: (1) Cina bersedia menjalin hubungan diplomatik dengan Singapura; (2) Cina ingin bekerjasama dengan negara-negara ASEAN untuk memelihara perdamaian, stabilitas dan kemakmuran di Asia Tenggara.

Sementara itu PM Singapura, Lee Kuan Yew, mengatakan: (1) Singapura berharap bahwa hubungan diplomatik dengan Cina dibuka secepatnya; (2) Singapura telah mengatakan bahwa pihaknya akan menjalin hubungan dengan Cina setelah Indonesia melakukannya; (3) normalisasi hubungan Indonesia-Cina merupakan perkembangan yang positif (*Antara*, 13-8-1990).

Kantor Berita Perancis, AFP, tanggal 12 Agustus 1990 memberitakan: (1) Singapura mendesak agar dalam sidang lima anggota tetap DK-PBB menekankan pada penyelesaian konflik Kamboja; (2) Singapura mendesak Cina agar mendorong Khmer Merah menerima penyelesaian konflik Kamboja yang dilakukan oleh PBB; (3) Vietnam tidak boleh menghalangi pembentukan Dewan Nasional Tertinggi (SNC) (*Antara*, 13-8-1990).

D. HUBUNGAN ASEAN-KOREA SELATAN

Pertemuan Komite Kerjasama Sektoral Bersama (JSCC) ASEAN-Korea Selatan berlangsung di Jakarta tanggal 13-14 Agustus 1990 dihadiri oleh perutusan enam negara ASEAN dan Korea Selatan.

Asisten Menlu Korea Selatan, Lee Ki Choo, mengatakan bahwa: (1) Korea Selatan dan ASEAN sepakat untuk mengembangkan proyek-proyek kerjasama di bidang perdagangan, penanaman modal dan pariwisata; (2) kerjasama Korea Selatan-ASEAN di bidang perdagangan mengalami kemajuan pesat; (3) tahun 1989 nilai perdagangan Korea Selatan ASEAN mencapai US\$8 trilyun dan penanaman modal Korea Selatan di negara-negara ASEAN mencapai US\$170 juta; (4) sampai akhir juni 1990 nilai investasi Korea Selatan di ASEAN mencapai sekitar US\$200 juta (*Antara*, 13-8-1990).

Pertemuan sepakat untuk: (1) mengadakan Pekan ASEAN di Seoul yang meliputi pameran dagang ASEAN, konperensi-konperensi perdagangan dan investasi, seminar mengenai pariwisata dan kebudayaan; (2) mengadakan program latihan bahasa Korea bagi pemandu wisata; (3) mengadakan karya wisata tentang peraturan penilaian bea-cukai GATT; (4) menyetujui pendanaan tahap awal proyek jaringan komputer antara Seknas ASEAN dan Sekretariat ASEAN; (5) mendirikan Komite Manajemen Bersama ASEAN-Korea Selatan di Jakarta dengan fungsi mengelola dana khusus kerjasama Korea Selatan; (6) menyetujui keikutsertaan sektor swasta ASEAN-Korea Selatan dalam pertemuan mendatang (*Bisnis Indonesia*, 15-8-1990).

VI. USAHA ASEAN MEMBANTU PENYELESAIAN KONFLIK KAMBOJA

- PERTEMUAN INFORMAL TENTANG KAMBOJA (PIK)

1. Persiapan-persiapan

Pejabat tinggi Deplu AS mengatakan di New York tanggal 29 Agustus 1990 bahwa: (1) lima anggota tetap DK-PBB mendukung usaha Indonesia untuk mengadakan pertemuan informal tentang Kamboja bulan September 1990; (2) pertemuan diharapkan membentuk Dewan Nasional Tertinggi Kamboja (*Supreme National Council - SNC*) sebagai pengendali pemerintahan peralihan di Kamboja; (3) pembentukan SNC memungkinkan badan itu menetapkan wakil-wakilnya untuk menduduki kursi Kamboja di PBB dan organisasi-organisasi internasional lainnya; (4) pertemuan anggota tetap DK-PBB tanggal 28-29 Agustus 1990 berhasil menyetujui sebuah kerangka kerja bagi penyelesaian Kamboja. Kerangka kerja itu meliputi: (a) peraturan administrasi menjelang pemilu; (b) pengaturan militer selama masa transisi; (c) pemilu di bawah pengawasan PBB; (d) perlindungan hak-hak asasi manusia; (e) jaminan internasional; (5) pelaksanaan kerangka kerja agar didukung oleh semua pihak yang berkonflik di Kamboja; (6) apabila kerangka kerja tersebut diterima dan SNC terbentuk maka segera diadakan Konperensi Paris dengan mengikutsertakan semua pihak yang berkepentingan dan Sekjen PBB; (7) tugas utama Konperensi Paris ialah mensahkan unsur-unsur bagi penyelesaian politik menyeluruh dan membuat rencana pelaksanaannya; (8) semua pihak yang terlibat dalam konflik Kamboja agar menahan diri agar tercipta perdamaian dan penyelesaian politik secara menyeluruh; (9) peranan PBB sangat besar dalam penyelesaian konflik Kamboja jika dibandingkan dengan masalah Namibia; (10) keperluan administrasi dan pasukan pemelihara perdamaian PBB di Kamboja selama 2-3 tahun diperkirakan mencapai US\$3-5 milyar dan AS bersedia menanggung 30%; (11) tugas PBB menjelang pemilu ialah mengadakan dan mengawasi gencatan senjata, mengadakan perlucutan senjata serta menjamin semua tentara Vietnam meninggalkan Kamboja (*Antara*, 29-9-1990).

Sekjen KPNLF, Ieng Mouly, mengatakan di Kamboja tanggal 28 Agustus 1990 bahwa: (1) faksi KPNLF menyambut baik kesepakatan DK-PBB mengenai penyelesaian politik Kamboja secara menyeluruh itu; (2) kesepakatan itu merupakan cara yang terbaik menuju persetujuan pembentukan SNC (*Kompas*, 29-8-1990).

Menlu Australia, Gareth Evans, mengatakan di Canberra tanggal 28 Agustus 1990 bahwa: (1) adanya kesepakatan DK-PBB telah mendekati resolusi akhir tentang penyelesaian masalah Kamboja; (2) dalam pertemuan lima anggota DK-PBB di New York tanggal 28-29 Agustus 1990, Cina memainkan peranan aktifnya; (3) jika Cina terus mendukung Khmer Merah perang saudara di Kamboja tidak akan selesai; (4) kesepakatan yang dicapai DK-PBB itu merupakan usulan Gareth Evans dalam pertemuan informal tentang Kamboja di Jakarta tanggal 26-28 Februari 1990 (*Kompas*, 30-8-1990).

Pejabat pada Dewan Menteri Rezim Phnom Penh, Hor Nam Hong, mengatakan di Phnom Penh tanggal 30 Agustus 1990 bahwa: (1) rezim Phnom Penh menyambut baik rencana perdamaian di Kamboja yang dilakukan oleh DK-PBB itu, dengan jaminan kenetralan PBB dan perlucutan senjata kepada Khmer Merah; (2) rezim Phnom Penh akan mematuhi ketentuan PBB yang akan mengadakan pengawasan di beberapa kementerianannya tetapi PBB agar menghormati kedaulatan Kamboja dan tidak menimbulkan kekosongan yang dapat dimanfaatkan oleh Khmer Merah; (3) pihaknya bersedia melucuti senjata dan mengendalikan pasukannya. Tetapi tidak mudah mengendalikan Khmer Merah yang senjatanya tersembunyi di hutan-hutan (*Antara*, 31-8-1990).

Pangeran Norodom Sihanouk mengatakan di Bangkok tanggal 30 Agustus 1990 bahwa: (1) pihaknya mendukung persetujuan perdamaian Kamboja yang dicapai kelima negara anggota tetap DK-PBB; (2) kerangka dokumen yang disetujui anggota DK-PBB akan menjamin perdamaian bagi rakyat Kamboja (*Antara*, 31-9-1990).

Pejabat Kemlu Vietnam mengatakan di Hanoi tanggal 31 Agustus 1990 bahwa: (1) Vietnam mendukung negara-negara anggota tetap DK-PBB untuk menyelesaikan masalah Kamboja; (2) penyelesaian politik secara menyeluruh di Kamboja harus dicapai dalam kerangka Konperensi Internasional tentang Kamboja di Paris atas dasar menghormati hak rakyat Kamboja dalam menentukan nasibnya sendiri (*Antara*, 31-9-1990).

Wakil Presiden CGDK, Khieu Samphan, mengatakan di New York tanggal 29 Agustus 1990 bahwa: (1) Khmer Merah mendukung persetujuan perdamaian Kamboja yang dicapai oleh kelima negara anggota tetap DK-PBB; (2) pihaknya akan merundingkan usulan DK-PBB dengan kedua mitranya dalam CGDK (*Kompas*, 31-8-1990).

Dalam wawancara dengan wartawan New China News Agency (NCNA), Menlu Cina, Xu Dunxin, mengatakan di Beijing tanggal 29 Agustus 1990 bahwa: (1) keberhasilan rencana perdamaian Kamboja yang disetujui DK-PBB tergantung pada keinginan Vietnam dan pemerintahan Phnom Penh; (2) SNC akan diketuai oleh Pangeran Norodom Sihaouk dan mempunyai perwakilan dari tiga faksi perlawanan serta dari pemerintahan Phnom Penh; (3) SNC akan menyelenggarakan pemilihan nasional dengan PBB sebagai supervisi; (4) agar segera dibentuk SNC untuk menciptakan rekonsiliasi nasional dan segera mengadakan kembali Konperensi Paris tentang masalah Kamboja (*Bisnis Indonesia*, 31-9-1990).

Menlu Ali Alatas mengatakan di Jakarta tanggal 31 Agustus 1990 bahwa: (1) penyelenggaraan pertemuan informal tentang masalah Kamboja belum dapat dipastikan; (2) pihak-pihak yang akan hadir yaitu keempat faksi Kamboja, utusan Sekjen PBB dan utusan Menlu Paris; (3) pertemuan akan membahas proses pembentukan SNC, terutama yang berkaitan dengan komposisi dan fungsi SNC (*Antara*, 31-8-1990).

2. Sidang-sidang PIK

Pertemuan informal tentang Kamboja (PIK) berlangsung di Jakarta, tanggal 9-10 September 1990, yang seharusnya berlangsung tanggal 5-8 September 1990, dihadiri oleh pemimpin empat faksi Kamboja, Menlu Ali Alatas, utusan Menlu Perancis, Ny. Edwige Avice, dan utusan khusus Sekjen PBB, Rafeudin Ahmed.

Menlu Ali Alatas mengatakan pada pembukaan pertemuan itu bahwa: (1) setiap orang atau pihak yang menghambat jalan menuju perdamaian akan menanggung beban tanggung jawab yang berat pada sejarah; (2) dunia internasional mengharapkan pihak-pihak yang terlibat dalam masalah Kamboja dapat menyusun tekad politik dengan meletakkan kepentingan tertinggi bangsa Kamboja di atas rasa saling tidak percaya dan permusuhan; (3) jika semua pihak mencapai kesepakatan maka PIK akan menjadi dasar bagi pertemuan ulang Konperensi Paris, dengan demikian PIK memberikan dorongan perdamaian di Kamboja; (4) kesepakatan lima anggota tetap DK-PBB merupakan kerangka dokumen yang masih memerlukan perincian melalui Konperensi Paris tentang Kamboja; (5) topik pembicaraan utama dalam PIK seharusnya dititikberatkan pada masalah proses pembentukan Dewan Nasional Tertinggi (SNC) (*Antara*, 10-9-1990).

Utusan Menlu Perancis, Ny. Edwige Avice, mengatakan bahwa: (1) faksi-faksi Kamboja agar menerima hasil kesepakatan lima anggota tetap DK-PBB; (2) keempat faksi Kamboja akan membentuk SNC, suatu lembaga yang mewakili kedaulatan Kamboja. Tetapi lembaga itu akan mendelegasikan kepada otoritas peralihan PBB di Kamboja (UNTAC) kekuasaan-kekuasaan yang perlu untuk melaksanakan persetujuan (Antara, 10-9-1990); (3) semua pihak yang terlibat dalam masalah Kamboja agar mengatasi perbedaan pendapat di antara mereka sendiri sehingga dapat memusatkan perhatian pada kepentingan utama Kamboja; (4) tidak ada pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan pemilu di bawah pengawasan PBB (*Kompas*, 10-9-1990).

Pada pertemuan hari kedua tanggal 10 September 1990, Menlu Ali Alatas mengatakan bahwa: (1) diterimanya kerangka perdamaian kelima anggota tetap DK-PBB (*Permanent Five - P5*) oleh faksi-faksi Kamboja dan terbentuknya SNC, tidak berarti bahwa masalah Kamboja telah selesai; masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan; (2) kedua Ketua bersama PICC (*Paris International Conference on Cambodia*) yaitu Indonesia dan Perancis akan mengadakan konsultasi dengan peserta lainnya untuk menyelenggarakan kembali PICC; (3) SNC akan menyerahkan sebagian besar kekuasaan di Kamboja kepada sebuah Badan Pengawas PBB sampai terselenggaranya pemilu dan terbentuknya pemerintahan baru (*Antara*, 11 September 1990).

PIK berakhir dengan sukses, ditandai dengan pernyataan bersama mengenai diterimanya dokumen anggota tetap DK-PBB sebagai kerangka dasar penyelesaian menyeluruh konflik Kamboja dan terbentuknya Dewan Nasional Tertinggi (SNC) Kamboja yang beranggotakan 12 orang.

Keempat faksi Kamboja sepakat untuk menerima: (1) seluruh isi dokumen yang dikeluarkan lima anggota tetap DK-PBB di New York pada tanggal 28 Agustus 1990; (2) pembentukan SNC dengan komposisi keanggotaan 6 + 6, yaitu terdiri atas enam orang dari pihak pemerintah Kamboja dukungan Vietnam dan dua orang masing-masing dari ketiga kelompok perlawanan Kamboja; (3) SNC yang merupakan sebuah badan legitimasi menjadi Pusat Kekuatan Tertinggi selama masa transisi, yaitu selama bangsa Kamboja berusaha menegakkan kembali kemerdekaan, kedaulatan dan persatuan; (4) keanggotaan SNC terdiri atas perorangan yang memiliki otoritas dan mewakili aspirasi rakyat Kamboja. SNC berhak menduduki kursi Kamboja di PBB mau-

pun badan-badan internasional lainnya atau menghadiri pertemuan-pertemuan internasional; (5) SNC untuk percaya penuh pada PBB demi menjamin pelaksanaan pemilu yang bebas dan adil serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kamboja; (6) usul Pangeran Sihanouk 8 September 1990 bahwa kalau ke-12 anggota SNC menganggap perlu untuk memilih Ketua SNC, maka dapat memiliki anggota ke-13 (*Antara*, 11-9-1990).

Beberapa negara seperti AS, Perancis, Inggris, Jepang, Vietnam, Muangthai, Singapura dan Australia menyambut positif kesepakatan empat faksi Kamboja untuk menerima kerangka dasar yang disusun oleh lima anggota tetap DK-PBB dan menyetujui pembentukan SNC.

Juru bicara Kemlu Vietnam mengatakan di Hanoi tanggal 11 September 1990 bahwa: (1) Vietnam menyambut baik kesepakatan faksi-faksi Kamboja tentang kerangka dasar yang disusun oleh lima anggota tetap DK-PBB dan pembentukan SNC; (2) masih banyak rintangan untuk mencapai perdamaian di Kamboja; (3) Vietnam akan terus memberikan sumbangan untuk mensukseskan Konperensi Kamboja (*Kompas*, 12-9-1990).

Juru bicara Kemlu AS mengatakan di New York tanggal 10 September 1990 bahwa: (1) AS menyambut baik kesepakatan faksi-faksi Kamboja tentang kerangka dasar yang disusun oleh lima anggota tetap DK-PBB dan pembentukan SNC; (2) pembentukan awal SNC merupakan langkah kritis dalam proses penyelesaian Kamboja (*Kompas*, 12-9-1990).

Menlu Jepang, Taro Nakayama, mengatakan di Tokyo tanggal 11 September 1990 bahwa: (1) Jepang menyambut baik kesepakatan faksi-faksi Kamboja tentang kerangka dasar yang disusun oleh lima anggota tetap DK-PBB dan pembentukan SNC; (2) Jepang berharap bahwa keempat faksi Kamboja dapat hadir dalam PICC; (3) kesepakatan merupakan langkah besar menuju proses perdamaian; (4) pembentukan SNC diharapkan dapat menjadi kunci menuju perdamaian; (5) masalah keanggotaan SNC sejalan dengan kesepakatan yang dicapai di Tokyo tanggal 4-5 Juni 1990 (*Kompas*, 12-9-1990).

Menlu Australia, Gareth Evans, mengatakan di Canberra tanggal 10 September 1990 bahwa: (1) kesepakatan pembagian kekuasaan yang dicapai antar faksi Kamboja yang bertikai diharapkan dapat mengakhiri

penderitaan; (2) kesepakatan penyelesaian politik masalah Kamboja yang diusulkan oleh lima anggota tetap DK-PBB dan pembentukan SNC mencerminkan pokok gagasan rencana perdamaian yang diusulkan Australia (*Kompas*, 12-9-1990).

Juru bicara Kemlu Inggris mengatakan di London tanggal 10 September 1990 bahwa: (1) Inggris menyam-

but baik kesepakatan faksi-faksi Kamboja tentang kerangka dasar yang disusun oleh lima anggota tetap DK-PBB dan pembentukan SNC; (2) kesepakatan itu merupakan langkah besar menuju perdamaian dan keamanan di Asia Tenggara; (3) pemerintah Inggris meminta semua faksi untuk menghentikan pertempuran dan sebaliknya bekerjasama dalam rincian penyelesaian politik (*Kompas*, 12-9-1990).



Para Penulis

- **JONI, T. Raka,**
Lulus Sarjana Muda FKIP Universitas Airlangga, Malang (1961); Master of Science in Elementary Education, State University College at Buffalo, N.Y. (1964), dan pada tahun 1969-1970 bertugas belajar berturut-turut pada Educational Testing Service, Princeton, N.Y., State University of New York at Albany dan Centro Intercultural de Documentation, Guarnavaca, Mexico. Mendapat gelar Doktor dalam Psikologi Pendidikan IKIP Malang (1972). Sejak tahun 1976 mengajar pada Program Doktor, yang kemudian menjadi Fakultas Pasca Sarjana IKIP Malang. Pada tahun 1980, diangkat sebagai Guru Besar IKIP Malang.
- **MARDIATMADJA, B.S.,**
Memperoleh Licensiat Filsafat di München, Jerman Barat, 1969; mendapat Sarjana Pendidikan di IKIP Sanata Dharma, Yogyakarta, 1973; mendapat Doktor Teologi di Universitas Innsbruck, Austria, 1976. Sejak 1978 menjadi tenaga pengajar tetap IKIP Sanata Dharma dan sejak 1986 juga mengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara dan Sekolah Tinggi Teologi Jl. Proklamasi Jakarta. Selama beberapa tahun ia juga menjadi dosen tamu dari East Asian Pastoral Institute di Manila, Philippines.
- **MIARSO, Yusufhadi,**
Baccalaureat PTPG Malang (1954), Master of Science (Education) Syracuse University, Amerika Serikat (1963), Diploma Educational Planning MacQuarie University, Australia (1970), dan Doktor Pendidikan IKIP Malang (1985). Pernah menjabat Kepala Pusat Teknologi Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan (1979-1984), Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (1984-1985), Direktur Pusat Antar Universitas-Universitas Terbuka (1985-1990), Memimpin penyusunan Master Plan on Educational Technology (1988), dan mewakili Indonesia dalam berbagai pertemuan internasional yang berhubungan dengan teknologi pendidikan, sejak 1973 hingga sekarang. Di samping itu hingga sekarang adalah Guru Besar Teknologi Pendidikan IKIP Jakarta, Ketua Program Studi Teknologi Pendidikan, Fakultas Pasca Sarjana IKIP Jakarta, dan dosen Fakultas Pasca Sarjana IKIP Malang dan Jakarta.
- **NAGA, Dali S.,**
Sarjana Teknik Elektro jurusan Telekomunikasi, Institut Teknologi Bandung (ITB), 1960; gelar Doktor Ilmu Pendidikan dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jakarta, 1980. Sekarang menjadi dosen di IKIP Jakarta, Fakultas Pasca Sarjana UI, Universitas Trisakti dan Sekolah Tinggi Manajemen dan Informatika Komputer Gunadarma, di samping menjabat Kepala Pusat Komputer IKIP Jakarta serta konsultan Pusat Komputer Universitas Tarumanagara.
- **SUPRIADI, Dedi,**
Sarjana Pendidikan dari FIP IKIP Bandung (1982), Magister Pendidikan (S2) dari Fakultas Pasca Sarjana IKIP Bandung, lulus Cum Laude (1985). Sandwich Program, State University of New York (1986), dan Doktor Ilmu Pendidikan dari FPS IKIP Bandung, lulus Cum Laude (1989). Staf pengajar Fakultas Pasca Sarjana, Fakultas Ilmu Pendidikan, dan Redaktur *Mimbar Pendidikan*, IKIP Bandung. Associate Director HAROEN CLIFFORD Inc., dan Program Direktur Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Pendidikan (LPPPI) Bandung.
- **VEMBRIARTO, St.,**
Sarjana Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1963). Ketua Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) Daerah Istimewa Yogyakarta (1985-). Sejak tahun 1987 hingga sekarang menjadi Guru Besar dalam mata pelajaran Sosiologi Deviansi pada Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Yogyakarta.